Apa Itu Sebuah Negara?

Anarkis Benar-Benar Menentang Negara: Sebuah Tanggapan untuk Kaum Marxis

Wayne Price

Kaum Marxis berpendapat bahwa kaum anarkis benar-benar mendukung sebuah negara, atau sesuatu yang tidak dapat dibedakan dari negara, tetapi tidak mengakuinya. Namun, yang dianjurkan oleh kaum anarkis adalah untuk menjatuhkan negara yang ada dan menciptakan sebuah asosiasi baru yang bukan negara, yang terdiri dari dewan-dewan, majelis-majelis, dan milisi rakyat. Tidak ada yang namanya "negara pekerja".

Kebanyakan orang percaya bahwa masyarakat tanpa negara, seperti yang dianjurkan oleh kaum anarkis, akan menjadi kekacauan ("anarki"). Banyak yang berpikir bahwa kaum anarkis menginginkan masyarakat yang pada dasarnya seperti apa adanya, tetapi tanpa polisi (yang pada kenyataannya, dianjurkan oleh kaum anti-negara pro-kapitalis yang menyebut diri mereka sebagai "libertarian"). Hal ini tentu saja akan mengakibatkan kekacauan, hingga mafia atau penjaga keamanan yang disewa oleh orang kaya (atau keduanya) menjadi negara baru.

Kritik yang lebih canggih adalah dengan mengatakan bahwa kaum anarkis benar-benar mendukung sebuah negara, mereka hanya tidak menyebutnya dengan nama itu. Seperti yang ditulis oleh Hal Draper, seorang Marxis, "… Negara telah menjadi kebutuhan masyarakat. … Begitu antistatisme… bahkan memunculkan pertanyaan tentang apa yang akan menggantikan negara… maka selalu jelas bahwa negara, yang dihapuskan dalam khayalan, akan diperkenalkan kembali dalam bentuk lain. … Dalam utopia anarkis… telinga runcing dari negara yang sangat tidak demokratis menyembul keluar…" (Draper, 1990, h. 109).

Para Leninis berpendapat bahwa apa yang diperjuangkan oleh kaum anarkis, paling banter, tidak dapat dibedakan dengan gagasan Marxis tentang "negara pekerja" ("kediktatoran proletariat"). Bagi mereka, ini adalah "transisi" antara negara kapitalis yang telah runtuh dan masyarakat tanpa negara.

Mereka merujuk anarkis pada Marx's Civil War in France (tentang Komune Paris 1871) dan Lenin's State and Revolution, sebagai karya yang paling libertarian yang pernah ditulis.

Namun, apa yang diusulkan oleh kaum revolusioner, perjuangan kelas, dan anarkis bukanlah negara. Ini adalah alternatif yang realistis terhadap negara.

Setelah Revolusi

Setelah transformasi revolusioner dari kapitalisme ke sosialis-anarkisme, akan ada kebutuhan untuk mengoordinasikan berbagai aspek masyarakat, terutama industri yang dikelola sendiri dan komune. Perlu ada cara untuk menyelesaikan perselisihan di antara berbagai sektor masyarakat dan juga di antara individu-individu. Akan ada kebutuhan untuk mengembangkan rencana ekonomi, secara demokratis, dari bawah ke atas. Hal ini akan menjadi kenyataan selama dan segera setelah revolusi, mengingat konflik dan kesulitan yang melekat pada periode tersebut.

Akan ada kebutuhan untuk menentang kekuatan-kekuatan bersenjata kontra-revolusioner, yang dikirim oleh negara-negara imperialis yang masih ada atau, dalam sebuah perang saudara, oleh tentara-tentara reaksioner internal. Individu-individu anti-sosial, yang diciptakan oleh masyarakat tanpa cinta dari kapitalisme sebelumnya, masih perlu ditangani. Kaum anarkis tidak percaya pada hukuman atau balas dendam, tetapi kami percaya bahwa kami harus melindungi masyarakat dari orang-orang yang tidak memiliki hati nurani dan orang sakit secara emosional.

Kaum anarkis telah lama menganjurkan federasi dewan tempat kerja dan majelis lingkungan untuk melaksanakan tugas-tugas ini (dirinci dalam Price, 2007). Dalam revolusi demi revolusi, para pekerja dan kaum tertindas telah

menciptakan dewan, komite, dan majelis yang mengatur dirinya sendiri, di tempat kerja dan lingkungan sekitar. Selama revolusi, kaum anarkis menyerukan kepada rakyat untuk membentuk asosiasi semacam itu dan menyatukan diri untuk mengkoordinasikan perjuangan. Konsep dewan-dewan federasi dimunculkan oleh Bakunin dan Kropotkin, dan terutama oleh Friends of Durruti Group di Spanyol, 1938. Secara implisit, hal ini mencakup hak kaum buruh untuk secara bebas mengorganisir diri mereka sendiri untuk memperjuangkan ide-ide mereka di antara penduduk lainnya (demokrasi "multi-partai" yang majemuk — yang tidak sama dengan membiarkan partai-partai mengambil alih dan memerintah).

Seharusnya tidak ada lagi badan-badan khusus yang terdiri dari orang-orang bersenjata, seperti militer atau polisi. Sebaliknya, akan ada populasi yang terorganisir, bersenjata, milisi yang terdiri dari para pekerja dan orang-orang yang sebelumnya tertindas, di bawah arahan dewan federasi. Ini akan ada sampai dianggap tidak diperlukan. Pasukan bersenjata rakyat (termasuk gerilyawan dan tentara partisan) telah bekerja dengan baik di masa lalu dan bahkan sampai sekarang di beberapa bagian dunia. Metode keamanan publik akan bekerja sebagian besar pada tingkat lokal, dalam masyarakat yang bebas dan cukup untuk semua.

Terhadap pendekatan ini, kaum Leninis dan beberapa orang lainnya menanggapi, "Kalian para anarkis benar-benar menganjurkan sebuah negara." Mereka merujuk pada pengalaman Komune Paris dan soviet-soviet (dewan-dewan) asli Rusia, dan mengatakan bahwa inilah yang mereka inginkan juga-tetapi mereka jujur dalam menyebutnya sebagai sebuah negara. Mereka mencatat bahwa, dalam bukunya Negara dan Revolusi, Lenin telah menafsirkan Marx dengan mengatakan bahwa negara kelas pekerja ini akan "segera" mulai "layu" atau "mati" — segera, sejak hari pertama. Kaum pekerja akan

semakin terlibat dalam mengelola masyarakat secara langsung, sementara perlawanan pro-kapitalis akan berkurang. Sebuah negara-sebuah institusi yang terspesialisasi, tersentralisasi, dan represif-akan didirikan, tetapi kemudian kebutuhan akan negara akan berkurang dan akhirnya lenyap. Apakah ini benar-benar berbeda dengan apa yang diinginkan oleh para anarkis?

Apa yang dimaksud dengan Negara?

Untuk menjawab pertanyaan ini, kita harus mendefinisikan apa yang kita maksud dengan "negara". Frederick Engels, rekan terdekat Marx, menggambarkan masyarakat sebelum adanya negara, seperti masyarakat pemburu-pengumpul atau masyarakat agrikultur awal. Ada sejumlah koersi dalam komunitas masyarakat dan bahkan "perang". Namun hal ini dilakukan oleh penduduk yang bersenjata, atau setidaknya orang-orang bersenjata di dalam masyarakat. Ketika masyarakat terbagi menjadi kelas-kelas, penguasa dan yang dikuasai, hal ini tidak mungkin lagi dilakukan. Negara dibedakan sebagai "institusi kekuatan publik yang tidak lagi langsung identik dengan organisasi rakyat sebagai kekuatan bersenjata. … Kekuatan publik ini ada di setiap negara; ia tidak hanya terdiri dari orang-orang bersenjata tetapi juga pelengkap material, penjara, dan lembaga-lembaga koersif dalam berbagai bentuk. … Para pejabat sekarang menampilkan diri mereka sebagai bagian dari masyarakat yang berdiri di atas masyarakat … perwakilan dari kekuasaan yang mengasingkan mereka dari masyarakat. …" (1972; hal. 229–230). Saya pikir para anarkis akan menerima deskripsi ini.

Seperti kaum anarkis pada masa itu, Marx dan Engels sangat terkesan dengan pengorganisasian diri kaum buruh ultra-demokratis Komune Paris. Di antaranya, Komune Paris menggantikan tentara permanen dengan milisi populer, Garda Nasional. Karena alasan-alasan tersebut, pada tahun 1875, Engels menulis sebuah surat yang mengusulkan perubahan

dalam program partai: “Seluruh pembicaraan tentang negara harus dihentikan, terutama sejak Komune, yang bukan lagi sebuah negara dalam arti yang sebenarnya. Oleh karena itu, kami mengusulkan untuk mengganti ‘negara’ di mana-mana dengan ‘Gemeinwesen’ (komunitas), sebuah kata dalam bahasa Jerman kuno yang baik yang dapat menggantikan kata ‘komune’ dalam bahasa Prancis” (dikutip dalam Lenin, 1970, hlm. 333).

Saya tidak bermaksud untuk membahas lebih jauh tentang konsep Marxis tentang negara, “kediktatoran proletariat”, atau hal-hal yang berkaitan dengannya (sekali lagi, lihat buku saya, Price 2007). Poin saya hanyalah bahwa, bahkan menurut deskripsi Marxis, negara adalah mesin birokrasi dan militer-polisi yang terasing secara sosial di atas masyarakat. Dengan deskripsi ini, negara bukanlah sesuatu yang dapat digunakan oleh kelas pekerja, baik untuk mentransformasi masyarakat menjadi sistem tanpa kelas, tanpa penindasan, maupun untuk mengelola masyarakat setelah transformasi. Tidak akan ada yang namanya “negara pekerja”.

Saya tidak berdalih tentang kata-kata. Orang boleh menyebut apa pun yang mereka inginkan; ini adalah negara semi-bebas. Tetapi kita perlu menyadari bahwa sistem dewan secara kualitatif berbeda dari semua negara dalam sejarah. Semua negara ini-bahkan yang didirikan oleh revolusi rakyat, seperti revolusi borjuis-demokratis Prancis atau revolusi AS-membentuk kekuasaan minoritas atas mayoritas yang dieksploitasi. Mereka harus terpisah dari rakyat, institusi yang berbeda, tidak peduli seberapa demokratis bentuknya. Tetapi dewan-dewan federasi dari komune buruh, yang didukung oleh rakyat bersenjata, adalah rakyat yang mengorganisir dirinya sendiri, bukan sebuah institusi yang berbeda. Ia dapat melaksanakan tugas-tugas tertentu yang telah dilakukan oleh negara di masa lalu, tetapi tidak berguna untuk

menggambarkannya sebagai sebuah negara. Ketika semua orang memerintah, tidak ada "pemerintah".

Leninisme dan Negara

Lenin berpendapat bahwa perlu untuk menjungkirbalikkan negara kapitalis yang ada saat ini, dan membangun sebuah negara baru, sebuah negara pekerja — untuk sementara, dalam masa transisi — yang pada akhirnya akan " layu." Apa yang akan dilakukan oleh kaum revolusioner, apa yang akan mereka kerjakan, adalah membangun negara baru. Negara yang "layu" akan dibiarkan mengurus dirinya sendiri. Dengan pendekatan seperti itu, tidak mengherankan jika apa yang dihasilkan oleh kaum Leninis adalah. sebuah negara.

"Kaum revolusioner yang menyatakan bahwa mereka menentang negara, dan untuk menghapuskan negara … melihat tugas utama mereka setelah revolusi adalah untuk membangun sebuah negara yang lebih solid, lebih terpusat, dan lebih merangkul semua orang dibandingkan negara yang lama. … Intinya bukanlah bahwa kaum buruh dan orang-orang tertindas lainnya tidak boleh membangun organisasi yang kuat selama dan setelah revolusi untuk mengelola ekonomi dan masyarakat, mempertahankan keuntungan mereka dan menekan para penindas, dll. Tetapi mereka juga perlu mengambil langkah-langkah untuk mencegah negara baru muncul dan menindas mereka. Artinya, mereka perlu memikirkan bagaimana mereka akan membangun masyarakat tanpa negara" (Taber, 1988, hal. 56 & 58). Dengan kata lain, aspek-aspek organisasi politik yang tersentralisasi dan represif harus secara aktif "dilumpuhkan" oleh rakyat pekerja.

Trotskyisme dan Negara

(Kaum Trotskyis sering mengatakan kepada kaum anarkis bahwa mereka menginginkan apa yang kita inginkan, sebuah asosiasi dewan yang terikat dengan milisi buruh. Inilah, kata

mereka, yang mereka maksud dengan “negara buruh”. Sejauh ini, bagus sekali.

Namun, mereka juga menggunakan “negara buruh” untuk menggambarkan rezim Lenin dan Trotsky di Rusia hingga sekitar tahun 1923. Ini adalah kediktatoran negara satu partai, dan sama sekali bukan sistem dewan yang demokratis. Pada saat revolusi 1917, terdapat soviet (dewan) demokratis, komite pabrik, serikat pekerja independen, berbagai partai sosialis dan kelompok anarkis (partai dan kelompok yang mendukung revolusi dan bertempur di pihak Bolshevik selama Perang Saudara), dan kaukus yang berbeda pendapat di dalam partai Bolshevik. Antara tahun 1918 dan 1921, demokrasi kelas pekerja yang hidup ini dihancurkan. Saya tidak memperdebatkan mengapa hal ini terjadi (kaum Trotskyis mengklaim bahwa hal ini sepenuhnya disebabkan oleh kondisi obyektif; kaum anarkis mengklaim bahwa politik otoriter Lenin dan Trotsky banyak berperan dalam hal ini). Namun, hal itu memang terjadi. Jadi, kaum Trotskyis menyebut sebuah negara di mana kaum buruh tidak memiliki kekuasaan, sebagai “negara buruh”. Dengan adanya kesempatan, bagaimana kita tahu bahwa mereka tidak akan menciptakan “negara buruh” yang sama lagi (bila “kondisi obyektifnya” ada)?

Ini akan menjadi lebih buruk. Salah satu sayap dari gerakan Trotskyis disebut “Trotskyisme ortodoks” atau “kaum pembela Soviet”. Mereka mengikuti pandangan Trotsky yang menyatakan bahwa Uni Soviet di bawah Stalin adalah sebuah rezim pembunuh massal yang totaliter, tetapi juga sebuah “negara buruh” (“negara buruh yang merosot”). Hal ini dikarenakan rezim ini memperluas properti yang dinasionalisasi dan bukan karena alasan lain. Demikian pula, rezim-rezim di Eropa Timur, Cina, dan Kuba juga merupakan “negara buruh” tanpa kontrol buruh (“negara buruh yang cacat”, kecuali Kuba yang dianggap sebagai “negara buruh” yang cukup baik).

Ada sayap Trotskyisme yang lebih demokratis, yang menolak pandangan Trotsky tentang Uni Soviet Stalin. Mereka percaya (seperti halnya sebagian besar kaum anarkis) bahwa birokrasi menjadi kelas penguasa baru dan ekonomi menjadi "kapitalis negara" atau suatu sistem eksploitasi yang baru.

Tetapi mereka masih percaya bahwa rezim Lenin dan Trotsky adalah sebuah "negara pekerja". Dan mereka percaya bahwa pemerintahan Stalin tetap merupakan sebuah "negara buruh" hingga beberapa titik balik (1929, ketika dorongan industrialisasi dimulai, atau akhir 1930-an, pada saat percobaan pembersihan besar-besaran ketika partai tersebut dibentuk kembali).

Maksud saya adalah, bagi kaum Trotskyis, konsep "negara pekerja" bukan hanya sebuah label untuk sistem dewan, yang sedikit berbeda dengan kaum anarkis. Ini adalah sebuah konsep yang mereka gunakan untuk menutupi institusi-institusi yang sangat tidak demokratis.

Ada juga kaum Leninis lainnya, seperti Komunis dalam tradisi partai-partai pro-Moskow yang lama, Maois, dan beberapa lainnya. Mereka jarang merujuk pada tujuan Marx tentang masyarakat tanpa negara. Mereka mendukung tirani satu partai yang mengerikan seperti Stalin atau Mao. Namun, mereka sering kali mengikuti pendekatan reformis, yaitu mencoba mengubah masyarakat melalui negara yang ada, bukan dengan berusaha menjungkirbalikkannya dan menciptakan sesuatu yang baru. Partai-partai Komunis terkenal dengan pendekatan ini. Namun, kaum Maois pun dapat mengikutinya, seperti yang dicontohkan oleh kaum Maois di Nepal yang mencoba mengambil alih negara borjuis melalui manuver parlementer. Bahkan kaum Trotskyis, dalam prakteknya, telah meninggalkan posisi Leninis mereka yang perlu menggulingkan negara borjuis. Hal ini terlihat dari dukungan mereka terhadap upaya Hugo Chavez untuk

membangun “sosialisme” melalui negara kapitalis Venezuela atau dukungan mereka terhadap para politisi pro-kapitalis yang mencalonkan diri dalam pemilihan umum, seperti Ralph Nadar.

Pandangan lain diungkapkan oleh Paul Mattick, Sr., seorang anggota council communist (Marxis libertarian). (Saya tidak membahas siapa yang memiliki interpretasi yang “benar” tentang Marx tentang negara. Saya juga tidak membahas masalah yang diangkat sebelumnya oleh Draper tentang kecenderungan otoriter dalam anarkisme). Bagi “Marx dan Engels… kelas pekerja yang menang tidak akan melembagakan sebuah negara baru atau merebut kendali atas negara yang ada. … Bukan melalui negara, sosialisme dapat direalisasikan, karena hal ini akan meniadakan penentuan nasib sendiri dari kelas pekerja, yang merupakan esensi dari sosialisme” (1983, hal. 160–161).

Kaum anarkis revolusioner dan kaum sosialis libertarian revolusioner lainnya bertujuan agar para pekerja dan semua yang tertindas membubarkan negara yang ada dan menggantinya dengan masyarakat yang demokratis dan dikelola sendiri secara radikal.

Referensi dan Saran Bacaan

- Draper, Hal (1990). Karl Marx’s Theory of Revolution; Vol. IV: Critique of Other Socialisms. NY: Monthly Review.
- Engels, Frederick (1972). The Origin of the Family, Private Property, and the State. NY: International Publishers.
- Lenin, V.I. (1970). Selected Works; vol. 2. Moscow: Progress Publishers.
- Mattick, Paul, Sr. (1983). Marxism: Last Refuge of the Bourgeoisie? Armonk NY: M.E. Sharpe.

- Price, Wayne (2007). The Abolition of the State: Anarchist and Marxist Perspectives. Bloomington IN: AuthorHouse.
- Taber, Ron (1988). A Look at Leninism. NY: Aspect Foundation.

***

Diambil dari Heart Void

(yang dipublikasikan pada Sep 13, 2024)

Diarsipkan oleh Archipelago Anarchist Archive (2025)

*Diterjemahkan oleh Heart Void ke bahasa indonesia, dari tulisan Wayne Price dengan judul asli “Is It a State?” dan dikutip dari: https://theanarchistlibrary.org/library/wayne-price-is-it-a-state